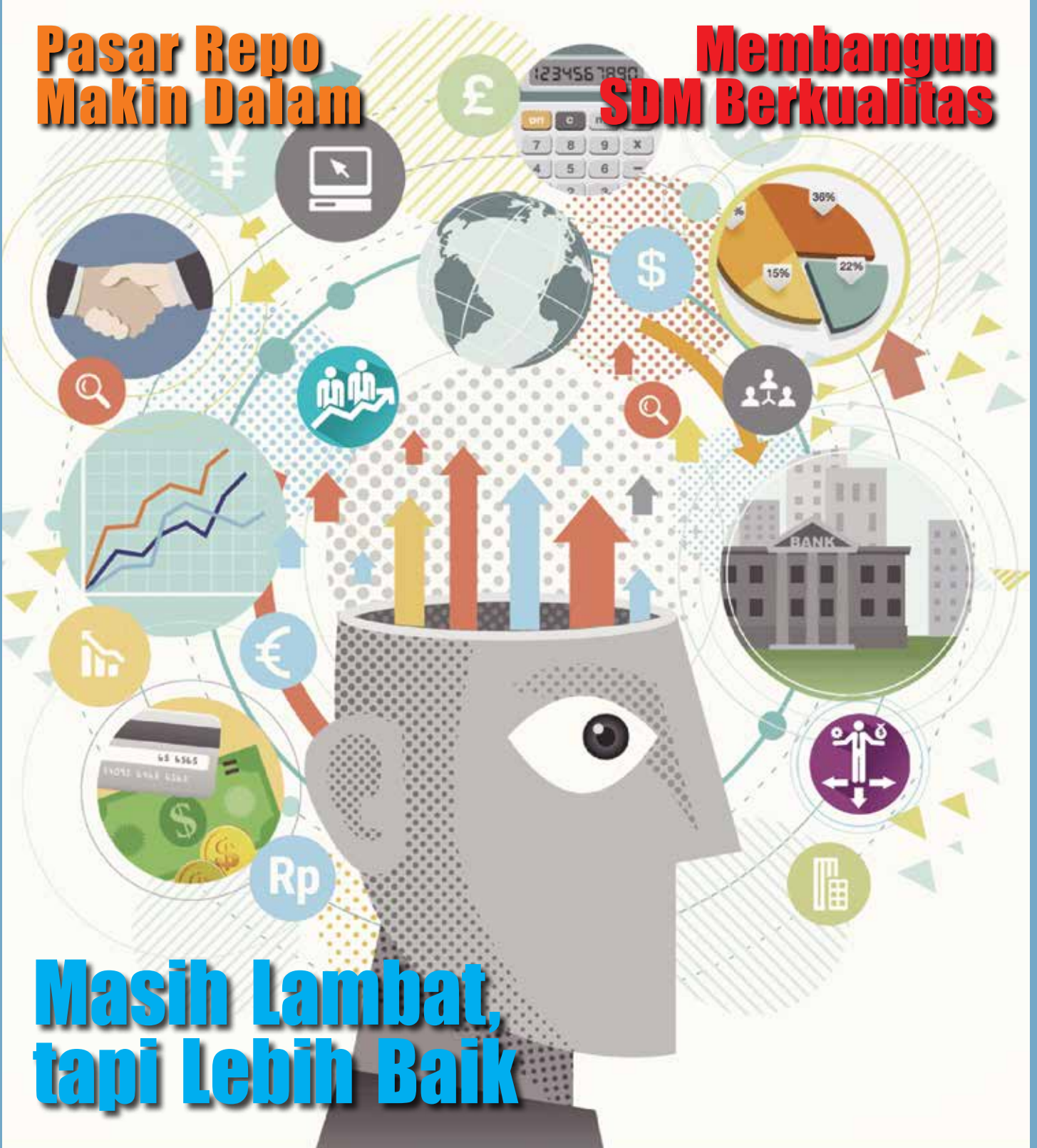


# PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

**Pasar Repo  
Makin Dalam**

**Membangun  
SDM Berkualitas**



**Masih Lambat,  
tapi Lebih Baik**



**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional  
(Perbanas)

**PELINDUNG**

Pengurus Pusat Perbanas

**PEMIMPIN REDAKSI**

Danny Hartono,  
Sekretaris Jenderal Perbanas

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

Rita Mirasari,  
Pengurus Bidang Humas Perbanas

**REDAKTUR PELAKSANA**

Eri Unanto

**SIRKULASI**

Wara Sri Indriani  
Adrian Burhan

**KONSULTAN**

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

**TARIF IKLAN**

**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

**Isi**

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**

Griya Perbanas Lantai 1  
Jalan Perbanas, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940  
Telepon: (021) 5255731, 5223038  
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: [www.perbanas.org](http://www.perbanas.org)  
e-mail: [sekretariat@perbanas.org](mailto:sekretariat@perbanas.org)

IZIN PENERBITAN KHUSUS  
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/  
STT/1993,  
2 September 1993  
ISSN: 0854-4174

## Menatap Tahun Depan Lebih Optimistis



Kondisi perekonomian global diperkirakan lebih baik pada 2017. Seiring dengan hal itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan pun diproyeksikan lebih baik ketimbang 2016. Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 memprediksi, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,3%. Demikian pula dengan World Bank, yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,3%.

Kondisi yang lebih baik itu tentu akan berdampak pada sektor industri dan para pelaku usaha, termasuk sektor perbankan. Potensi perbankan untuk tumbuh pada 2017 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

Pendanaan perbankan pada 2017 diperkirakan lebih longgar. Hal itu merupakan dampak dari berbagai kebijakan yang diberlakukan pada 2016, terutama pada akhir tahun, mulai dari pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia (BI) hingga kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dilansir pemerintah. Pada saat program *tax amnesty* berjalan, memang banyak terjadi penarikan dana di bank-bank.

Hingga Agustus 2016, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh 5,58% secara *year on year (yoy)* atau menjadi Rp4.610,13 triliun. Dana murah yang terdiri atas tabungan dan giro masih mendominasi komposisi dana di perbankan. Dari total DPK sebesar Rp4.585,38 triliun, 53,81% atau sebesar Rp2.467,44 triliun merupakan dana murah. Komposisinya, tabungan sebesar Rp1.407,66 triliun (30,70%) dan giro Rp1.059,78 triliun (23,11%). Sementara, deposito yang merupakan dana mahal tercatat Rp2.117,94 triliun (46,19%).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI juga memperkirakan, pertumbuhan kredit bank pada 2017 akan lebih tinggi ketimbang 2016. OJK memprediksi, kredit akan tumbuh di kisaran 12%-14%. Sementara, menurut perkiraan BI, pertumbuhan kredit perbankan tahun depan sekitar 11%, tapi tergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jika perekonomian nasional tumbuh di atas 5,1%, pertumbuhan kredit perbankan bisa lebih tinggi lagi.

Secara umum, OJK melihat potensi pertumbuhan bisnis perbankan pada 2017 lebih baik karena beberapa indikasi berikut. Satu, potensi bisnis perbankan yang besar dengan pasar domestik yang luas dan ditopang oleh deregulasi kebijakan ekonomi pemerintah di berbagai bidang/sektor ekonomi serta masih rendahnya *loan to gross domestic product (GDP) ratio* (sekitar 38%).

Dua, proyek pengembangan infrastruktur oleh pemerintah yang membutuhkan dukungan layanan perbankan (*financing*). Tiga, produk-produk perbankan yang masih relatif tradisional berpotensi dikembangkan menjadi makin kompleks. Empat, inflasi yang rendah membuka ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan sehingga berimbas pada suku bunga kredit yang lebih rendah. Lima, suku bunga yang rendah berpotensi meningkatkan permintaan kredit perbankan di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif membaik. Enam, profitabilitas perbankan yang cukup tinggi sangat menarik bagi investor. Tujuh, kebijakan *tax amnesty* yang menyebabkan arus modal masuk (*capital inflow*) cukup besar.

Kendati demikian, pelaku perbankan tetap mesti lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Mengingat, masih banyak sektor yang terkena dampak ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Selain itu, bank harus mewaspadai tren peningkatan kredit bermasalah. *Non performing loan (NPL)* perbankan pada Agustus 2016 tercatat meningkat menjadi 3,22% dari 2,76% pada Agustus 2015. ■

**Dari Redaksi** ..... 1

**Perbanas Utama**

**Masih Lambat, tapi Lebih Baik** ..... 3  
 Ketidakpastian perekonomian global masih terus berlanjut. Pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat akan memengaruhi perekonomian Indonesia ke depan. Industri perbankan diperkirakan masih melambat, walaupun lebih baik ketimbang 2016.



**Mulai Optimistis dan Pasang Strategi Jitu** ..... 6  
**Potensi Tumbuh Lebih Baik**..... 8  
**Properti dan Infrastruktur Bisa Menjadi Motor**..... 9

**Kinerja**

**Melonggarkan Ruang Bisnis UMKM**..... 10  
 Industri perbankan wajib menyalurkan kredit UMKM dengan besaran tertentu secara bertahap demi meningkatkan peran UMKM dalam struktur perekonomian bangsa. Meski belum semua bank memenuhi ketentuan tersebut, setidaknya *concern* perbankan terhadap UMKM terus terjaga.



**Wacana**

**Menanti Beleid NPG**..... 12

**Profil**

**Adrian Panggabean,**  
 Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk

**Tiga Tantangan Perbankan Nasional** ..... 14

Perkembangan ekonomi, globalisasi, dan peningkatan penetrasi perbankan saat ini menjadi tantangan pelaku industri perbankan, mulai dari sumber daya manusia, inovasi produk, layanan, hingga mitigasi risiko.



**Sekilas Berita**

**Mengawal SDM Perbankan 2020**..... 17

**Liputan Khusus**

**Membangun SDM Berkualitas**..... 18  
 Globalisasi tak bisa dihindari. Para pelaku industri harus menyiapkan diri untuk bisa bersaing dengan pelaku industri lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya, menyiapkan SDM yang berkualitas.

**Kompetensi, Sertifikasi, dan Standardisasi** ..... 20  
**Kesiapan SDM Menghadapi Dinamika Pasar**..... 21

**Aktualita**

**Pasar Repo Makin Dalam**..... 22  
 Transaksi repo terus digencarkan. Dengan banyaknya pelaku pasar yang ikut berpartisipasi diharapkan pasar keuangan di dalam negeri bisa makin dalam.



**BI 7-Day Repo Turun Beruntun** ..... 24



# Masih Lambat tapi Lebih Baik

Ketidakpastian perekonomian global masih terus berlanjut. Pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat akan memengaruhi perekonomian Indonesia ke depan. Industri perbankan diperkirakan masih melambat, walaupun lebih baik ketimbang 2016.

**P**erekonomian global masih melambat dan tidak merata. Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih rendah tersebut tercermin dari indikator konsumsi yang belum solid dan investasi yang diperkirakan masih mengalami kontraksi. Sementara itu, ekonomi negara-negara Eropa dan India diperkirakan tumbuh lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya.

Di dalam negeri, perekonomian Indonesia hingga kuartal/triwulan ketiga 2016 masih berjalan lambat dan tidak sekuat dari yang diperkirakan sebelumnya. Konsumsi terindikasi membaik, meskipun masih terbatas. Di lain sisi, perbaikan investasi swasta, khususnya nonbangunan, diperkirakan masih belum kuat, sejalan dengan kapasitas produksi terpasang yang masih cukup besar.

Dari sisi fiskal, stimulus fiskal diperkirakan masih terbatas, sejalan dengan penyesuaian belanja pemerintah pada semester kedua 2016. Melihat perkembangan yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2016 diperkirakan cenderung mendekati batas bawah kisaran 4,9%-5,3% (*year on year* atau *yoy*).

Terkait dengan neraca, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan mengalami surplus yang lebih baik, dengan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, pada triwulan ketiga 2016 defisit transaksi berjalan diperkirakan berada di bawah 2% dari produk domestik bruto (PDB).

Sedangkan untuk neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus sebesar US\$2,09 miliar atau meningkat dibandingkan dengan surplus pada triwulan ketiga 2016 yang sebesar US\$1,92 miliar. Aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan Indonesia hingga September 2016

**PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL (%yoy)**

Negara	2014	2015	2016			2017		
			Juni 2016	Sept 2016	IMF* (WEO)	Juni 2016	Sept 2016	IMF* (WEO)
Dunia	3,4	3,1	3,1	3,0	3,1	3,3	3,2	3,4
Amerika	2,4	2,5	2,0	1,8	2,2	2,2	2,2	2,5
Eropa	0,9	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,4	1,4
Jepang	0,0	0,6	0,5	0,5	0,3	0,0	0,1	0,1
Tiongkok	7,3	6,9	6,5	6,5	6,6	6,2	6,2	6,2
India	7,3	7,3	7,5	7,3	7,4	7,5	7,4	7,4

\*Perkiraan Juli 2016

mencapai US\$12,1 miliar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir September 2016 mencapai US\$115,7 miliar.

Inflasi sepanjang 2016 tetap terkendali pada level yang rendah. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2016 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,22% (*month to month* atau *mtm*). Di lain sisi inflasi IHK secara *year to date* (*ytd*) dan tahunan (*yoy*) masing-masing mencapai 1,97% dan 3,07%. Inflasi inti tetap stabil, tercatat sebesar 3,21% (*yoy*).

Walau terjadi perlambatan sepanjang 2016, kinerja dan stabilitas perbankan masih terjaga dengan baik. Menurut data yang dihimpun dan diolah Biro Riset Infobank (*birI*), hingga posisi Agustus 2016, rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau *CAR*) mencapai 22,97%. Rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) tercatat sebesar 3,22% (*gross*).

Pertumbuhan kredit hingga Agustus 2016 tercatat sebesar 6,65% (*yoy*), lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya. Posisi kredit yang disalurkan perbankan pada akhir Agustus 2016 tercatat sebesar Rp4.177,3 triliun. Perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi.

Selanjutnya, dana pihak ketiga (DPK) hingga Agustus 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,58% (*yoy*), turun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Hingga posisi ini perbankan membukukan DPK sebesar Rp4.610,13 triliun.

Sebagai catatan, pada tahun lalu, yakni hingga Desember 2016, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,40% atau menjadi sebesar Rp4.092,10 triliun. Sedangkan

DPK tumbuh sebesar 7,26% atau meningkat menjadi sebesar Rp4.413,06 triliun.

Melambatnya pertumbuhan kredit berimbas terhadap pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2016 yang mengalami perlambatan. Pada periode itu pertumbuhan M2 tercatat sebesar 7,7% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 8,2% (*yoy*). Berdasarkan komponennya, perlambatan pertumbuhan M2 bersumber dari komponen M1 dan uang kuasi (simpanan berjangka dan tabungan, baik rupiah maupun valas, serta giro valas) yang masing-masing tumbuh 10,6% (*yoy*) dan 6,9% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 10,9% (*yoy*) dan 7,5% (*yoy*).

Bagaimana dengan prospek 2017? Jika melihat perkembangan ekonomi makro yang berangsur-angsur membaik serta reformasi struktural yang mulai memperlihatkan hasil, perekonomian pada tahun mendatang diperkirakan mengalami perbaikan. Namun, daya beli masyarakat belum pulih. Karena itu, untuk mendongkraknya dibutuhkan stimulus fiskal dan kebijakan pemerintah, yang diiringi dengan kebijakan moneter guna mendorong dunia usaha.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu kembali melonggarkan kebijakan makroprudensial. Pada September 2016 BI menurunkan suku bunga acuannya, BI 7-Day Repo Rate, sebesar 25 *basis points* dari 5,25% menjadi 5%. Sebelumnya, BI sudah menurunkan rasio kredit terhadap nilai agunan (*loan to value* atau *LTV*) di sektor properti dari

KINERJA KEUANGAN BANK UMUM									
KETERANGAN	DES 2012	DES 2013	DES 2014	DES 2015	▲YOY (%)	AGS 2015	AGS 2016	▲YOY (%)	▲YTD (%)
<b>DALAM RP TRILIUN</b>									
- TOTAL ASET	4.262,59	4.954,47	5.615,15	6.132,58	9,21	6.010,75	6.382,65	6,19	4,08
- DANA PIHAK KETIGA	3.225,20	3.663,97	4.114,42	4.413,06	7,26	4.366,57	4.610,13	5,58	4,47
* GIRO	767,07	846,78	889,59	987,53	11,01	1.041,54	1.060,73	1,84	7,41
* DEPOSITO	1.381,30	1.604,48	1.940,38	2.029,51	4,59	2.082,34	2.125,61	2,08	4,74
* TABUNGAN	1.076,83	1.212,71	1.284,46	1.396,01	8,68	1.242,69	1.423,79	14,57	1,99
- KREDIT	2.725,67	3.319,84	3.706,50	4.092,10	10,40	3.916,70	4.177,31	6,65	2,08
- AKTIVA PRODUKTIF (AP)	4.608,66	5.600,15	6.182,90	6.785,35	9,74	6.741,85	7.175,94	6,44	5,76
- MODAL DISETOR	123,28	138,14	153,44	164,27	7,06	159,96	172,70	7,97	5,13
- MODAL SENDIRI	510,50	644,98	773,76	938,07	21,23	885,63	1.060,27	19,72	13,03
- LABA BERSIH	92,83	106,71	112,21	104,63	-6,76	68,36	74,58	9,10	-28,72
<b>DALAM PERSEN (%)</b>									
- ROA	3,08	3,03	2,76	2,26		2,24	2,29		
- LDR	84,93	89,94	89,30	91,95		88,89	89,94		
- NPLS (GROSS)	1,87	1,77	2,16	2,49		2,76	3,22		
- BOPO	74,15	74,31	77,31	82,17		82,19	81,99		
- CAR	17,32	18,00	19,45	21,16		20,54	22,97		
- KREDIT / AP	59,14	59,28	59,95	60,31		58,10	58,21		
- NIM	5,39	4,80	4,13	5,23		5,16	5,42		
<b>JUMLAH BANK</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>-0,84</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KANTOR</b>	<b>29.945</b>	<b>31.847</b>	<b>32.739</b>	<b>32.963</b>	<b>0,68</b>	<b>32.811</b>	<b>32.769</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,59</b>

KETERANGAN:  
 - ▲YOY: PERTUMBUHAN YEAR ON YEAR;  
 - ▲YTD: PERTUMBUHAN YEAR TO DATE;  
 - DATA KREDIT TERDIRI DARI KREDIT KEPADA PIHAK KETIGA DAN KREDIT KEPADA BANK LAIN.

SUMBER : OJK, DIOLAH KEMBALI OLEH BIRO RISET INFOBANK (BIRI).

---

## Prediksi adanya perbaikan ekonomi global tentu akan mendorong pertumbuhan industri perbankan di Tanah Air. Pada 2017 industri perbankan memiliki ruang pertumbuhan yang lebih baik daripada 2016. Namun, ruang pertumbuhannya masih sempit.

---

80% menjadi 85%. Uang muka pembelian rumah diturunkan dari 20% menjadi 15%. Relaksasi ini diharapkan mampu menggairahkan konsumsi masyarakat melalui transmisi kredit.

Pada 2017 perekonomian global diperkirakan mengalami perbaikan. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian global pada tahun depan mencapai 2,8%, sedangkan pada 2016 sebesar 2,4%. Sementara itu, perekonomian Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 5,3% pada 2017.

Prediksi adanya perbaikan ekonomi global tentu akan mendorong pertumbuhan industri perbankan di Tanah Air. Pada 2017 industri perbankan memiliki ruang pertumbuhan yang lebih baik daripada 2016. Namun, ruang pertumbuhannya masih sempit. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1%, sulit bagi perbankan untuk menggenjot pertumbuhan kredit di atas 12%. Namun, jika produk domestik bruto (PDB) bisa tumbuh hingga 5,3%, industri perbankan bisa meraih kenaikan kredit lebih tinggi lagi.

Dari sisi likuiditas, bank-bank harus mengurangi dana berbiaya mahal. Ini menjadi tantangan bagi bank-bank kecil yang likuiditasnya ditopang oleh loyalitas nasabah yang mengharap suku bunga tinggi. Jika tujuan program *tax amnesty* untuk memasukkan dana dari luar negeri ke dalam negeri tercapai, hal itu akan meningkatkan likuiditas di pasar domestik dan bisa dinikmati bank-bank. Namun, jika program *tax amnesty* baru direspons dengan pembayaran uang tebusan, yang banyak terjadi ialah penarikan dana dari bank sehingga menegatkan kondisi likuiditas. Kondisi likuiditas yang menegat akan berakhir jika dana repatriasi dari luar negeri masuk ke dalam negeri.

Kinerja perbankan pada 2017 sangat tergantung dari kemampuan bank-bank dalam memitigasi risiko dan memanfaatkan ruang sempit untuk meraih pertumbuhan kredit. Selain itu, sangat tergantung dari kemampuan bank-bank mencermati sinyal penguatan sektor-sektor usaha yang menyerap kredit, lalu lebih mengutamakan kualitas aset produktifnya, meningkatkan efisiensi, dan melakukan inovasi di layanan digital untuk mengikuti pasar yang berubah sangat cepat. ■

## Jumlah Rekening Simpanan yang Dijamin Naik

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan yang dijamin pada bank umum hingga posisi Agustus 2016. Total rekening simpanan yang dijamin mencapai 187.238.920 rekening atau tumbuh sebesar 1,17% dibandingkan dengan posisi hingga Juli 2016.

Untuk simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat sebesar 1,17% (*month to month* atau *mtm*), dari 184.848.848 rekening pada Juli 2016 menjadi 187.008.104 rekening pada Agustus 2016. Jumlah nominal simpanan naik sebesar 0,27% (*mtm*), dari posisi akhir Juli 2016 dengan jumlah nominal simpanan sebesar Rp2.068.295 miliar pada Juli 2016, menjadi Rp2.073,84 triliun pada Agustus 2016.

Untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekening meningkat 1,52% (*mtm*), dari 227.358 rekening pada Juli 2016 menjadi 230.816 rekening pada Agustus 2016. Jumlah nominal simpanannya juga naik sebesar 0,43% (*mtm*), dari Rp2.593,41 triliun pada Juli 2016 menjadi Rp2.604,45 triliun pada Agustus 2016.

Berdasarkan jenis simpanannya, yaitu giro, tabungan, *deposit on call*, sertifikat deposito, dan deposito, jenis simpanan yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi ialah tabungan. Kenaikannya mencapai 1,20%, dari 178.113.773 rekening pada Juli 2016 menjadi 180.246.609 pada Agustus 2016. Nominal simpanan yang mengalami kenaikan paling tinggi juga tabungan. Kenaikannya mencapai 1,18%, dari Rp1.410,31 triliun pada Juli 2016 menjadi Rp1.426,89 triliun pada Agustus 2016.

Dilihat dari jenis mata uang, jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam rupiah meningkat, sebaliknya jumlah rekening dalam valas turun tipis. Untuk nominal simpanan, nominal simpanan dalam rupiah dan valas sama-sama mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya.

Peningkatan jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam rupiah yaitu sebesar 1,18% (*mtm*), dalam hal ini per akhir Juli 2016 berjumlah 183.998.727 rekening, menjadi 186.168.335 rekening per akhir Agustus 2016. Jumlah rekening simpanan dalam valas turun tipis. Per Juli 2016 jumlahnya 1.077.479 rekening, kemudian menjadi 1.070.585 rekening pada Agustus 2016.

Dilihat dari nominalnya, simpanan dalam rupiah meningkat 0,36% (*mtm*), dari sebesar Rp3.985.712 miliar pada April 2016 menjadi Rp3.999,90 triliun pada Agustus 2016. Simpanan dalam valas jumlahnya juga naik sebesar 0,35% (*mtm*) dari sebesar Rp675.992 miliar pada Juli 2016 menjadi Rp678,38 triliun pada Agustus 2016. Total simpanan di bank umum per Agustus 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp16,58 triliun atau 0,36% (*mtm*) dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2016 dan nilainya menjadi sebesar Rp4.678,28 triliun. ■

# Mulai Optimistis dan Pasang Strategi Jitu

Perekonomian Indonesia diproyeksikan mengalami perbaikan pada 2017. Hal itu akan mendorong bisnis perbankan, termasuk pertumbuhan kredit. Bagaimana dan seperti apa target para pelaku usaha di sektor ini?

**P**elaku industri perbankan nasional lebih optimistis menyambut 2017. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3%. Melihat potensi dan asumsi makro-ekonomi, sebagian besar para pelaku usaha di sektor perbankan optimistis memasang target bisnis pada 2017. Tentu pencapaian yang diinginkan harus berlandaskan pada strategi yang tepat dan jitu.

Proyeksi ekonomi pada tahun mendatang bergantung pada proyek pemerintah di infrastruktur. Jika berjalan lancar, penyerapan tenaga kerja pun akan lancar. *Multiplier effect*-nya ialah proyek infrastruktur bisa menyerap tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Seperti apa dan bagaimana para pelaku usaha di sektor ini memasang target? Bagaimana strategi yang diterapkan? Berikut tanggapan beberapa pelaku usaha di sektor perbankan.

## Pahala N. Mansury, Direktur Finance & Treasury PT Bank Mandiri Tbk Optimistis Capai Target

Bisnis perbankan hingga kuartal/triwulan ketiga 2016 masih belum menggeliat optimal. Termasuk penyaluran kredit yang masih mengalami perlambatan. Memasuki akhir 2016, para pelaku perbankan optimistis perekonomian pada 2017 akan lebih baik. Begitu pun dengan bisnis perbankan, termasuk penyaluran kredit.

Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang menyatakan optimismenya menyambut tahun depan. Pahala N. Mansury, Direktur Finance & Treasury Bank Mandiri, mengatakan optimistis bisa mencapai target pertumbuhan kredit dalam kisaran 12%-14% pada 2017. Memang, hingga saat ini Bank Mandiri masih melakukan perencanaan bisnis untuk tahun depan. "Tahun depan kalau kami lihat mungkin berkisar antara 12% dan 14%. Memang kami masih melakukan perencanaan untuk 2017," terangnya.

Menurutnya, ada kemungkinan kondisi makro-ekonomi membaik pada tahun mendatang. Sebagai informasi, hingga Juli 2016, pertumbuhan penyaluran kredit Bank Mandiri sudah mencapai 10,5% atau meningkat menjadi sebesar Rp610,9 triliun. Pencapaian ini membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



Walau perekonomian mengalami perbaikan, Bank Mandiri akan lebih selektif menyalurkan kredit. Pada tahun depan Bank Mandiri akan memperkuat kredit di segmen mikro dan korporasi yang masing-masing didorong tumbuh hingga 15%. Sektor kredit korporasi yang menjadi incarannya ialah infrastruktur.

Penyaluran kredit infrastruktur dan perumahan akan menjadi segmen yang mendukung pertumbuhan kredit pada tahun depan, mengingat banyaknya

proyek infrastruktur yang sedang dan akan berjalan dalam waktu ke depan. "Sektor infrastruktur juga kita harapkan lebih baik karena proyek-proyeknya sudah dimulai. Sehingga, nanti pencairannya kita harapkan lebih kencang lagi," jelasnya.

Kredit konsumen diharapkan Bank Mandiri juga membaik, terutama untuk kredit pemilikan rumah (KPR). "Konsumer kita harapkan membaik karena memang kita lihat baik *timing*-nya saat ini, di mana tren bunga pada saat ini trennya menurun. Seperti sektor perumahan. Ini juga tenornya jangka panjang bisa sampai 15 tahun untuk KPR," ungkapnya.

Parwati Surjaudaja,  
Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk

## Menyisir Seluruh Segmen



Berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah dan pemangku kebijakan yang terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berdampak pada perbaikan ekonomi 2017. Hal ini sangat positif bagi pertumbuhan bisnis perbankan.

Pada 2017 pertumbuhan kredit perbankan diproyeksikan lebih baik ketimbang pencapaian pada 2016. Menurut Parwati Surjaudaja, Presiden

**Untuk mencapai pertumbuhan bisnis pada tahun depan, Bank OCBC NISP akan menyisir seluruh segmen secara merata, seperti kredit usaha kecil dan menengah (UKM) dan kredit untuk individu maupun korporasi.**

Direktur Bank OCBC NISP, hal itu sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2017. “Memang masih agak dini untuk memprediksi, tapi rasanya pertumbuhan kredit berkisar 12%-16% masih mungkin,” terangnya.

Untuk mencapai pertumbuhan bisnis pada tahun depan, Bank OCBC NISP akan menyisir seluruh segmen secara merata, seperti kredit usaha kecil dan menengah (UKM) dan kredit untuk individu maupun korporasi. Sebagai informasi, pada 2016 bank ini memasang target pertumbuhan kredit sekitar 10%-15%.

Achmad Baiquni,  
Direktur Utama Bank Negara Indonesia Tbk

## Fokus dan Pilih Risiko Rendah



Bank Negara Indonesia (BNI) hingga kuartal/triwulan ketiga 2016 mencatat pertumbuhan kredit di atas pertumbuhan industri secara keseluruhan. Pada periode ini pertumbuhan kredit BNI tercatat sebesar 21,1% (*year on year* atau *yoy*) atau meningkat menjadi sebesar Rp372,02 triliun. Sebagai catatan, pada tahun ini BNI memasang target pertumbuhan kredit sebesar 16%-17%.

Pencapaian BNI tak lepas dari strategi yang diterapkan sepanjang 2016. “Strategi yang dilakukan manajemen BNI untuk mendorong pertumbuhan kredit di atas industri ialah, pertama, menggali potensi pasar pembiayaan BUMN dengan fokus pada proyek infrastruktur dan sektor industri yang memiliki risiko rendah dan terkontrol. Kedua, mengoptimalkan jaringan dan *outlet* untuk mampu menggarap potensi pasar yang ada. Ketiga, menggali potensi *supply chain* debitur korporasi,” terang Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI.

Penyaluran kredit BNI ke sektor *business banking* menjadi

yang terbesar dengan komposisi 73,0% dari total kredit atau sebesar Rp271,68 triliun. Pada sektor ini kredit BNI disalurkan ke segmen korporasi sebanyak 24,3%, kredit BUMN 19,1%, segmen menengah 16,3%, dan segmen kecil 13,3%.

Untuk meningkatkan penyaluran kredit ke segmen korporasi, manajemen BNI telah melaksanakan paduan strategi. Pertama, fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan BUMN. Kedua, fokus pada pembiayaan sektor berisiko rendah, seperti konstruksi, pertanian, serta sektor listrik, gas, dan air. Ketiga, tidak melakukan ekspansi ke sektor yang berisiko cukup tinggi karena faktor eksternal, seperti sektor minyak dan pertambangan.

Strategi yang disiapkan oleh manajemen BNI dalam mengoptimalkan penyaluran kredit ke segmen menengah ialah meningkatkan kualitas *monitoring* pembiayaan kredit segmen menengah melalui pemberian kewenangan pemimpin wilayah. Selain itu, mengoptimalkan debitur-debitur segmen menengah yang merupakan *supply chain financing* debitur korporasi.

Untuk 2017, Baiquni meyakini pembangunan infrastruktur akan menjadi pendorong pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut berbagai proyek infrastruktur bakal digarap. ■

**Strategi yang disiapkan oleh manajemen BNI dalam mengoptimalkan penyaluran kredit ke segmen menengah ialah meningkatkan kualitas *monitoring* pembiayaan kredit segmen menengah melalui pemberian kewenangan pemimpin wilayah.**



# Potensi Tumbuh Lebih Baik

OJK dan BI memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2017 lebih baik. Hal itu terkait erat dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**P**erekonomian Indonesia pada 2017 diproyeksikan lebih baik ketimbang 2016. Berbagai perbaikan dan kebijakan yang ditempuh pemerintah pada 2016 akan berdampak pada perbaikan ekonomi tahun depan. Berbagai program ekonomi yang digelar sepanjang 2017 akan menjadi peluang bagi bisnis perbankan nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis industri perbankan akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada 2017, terutama dengan makin banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Budi Armanto, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan II OJK, kondisi perbankan saat ini masih sangat baik, terutama dilihat dari kian tebalnya permodalan untuk mengantisipasi berbagai risiko.

“Kondisi perbankan relatif baik dengan arah positif, terlihat dari meningkatnya *banking condition indicator*, ditopang oleh kenaikan rasio kecukupan modal, perbaikan indeks harga saham sektor keuangan, dan suku bunga PUAB (pasar uang antarbank) yang relatif menurun,” terangnya.

OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2017 berada di kisaran 12%-14%. OJK menilai, ada beberapa peluang yang membuat kinerja perbankan tahun depan tumbuh lebih baik. Di antaranya, proyek pengembangan infrastruktur oleh pemerintah yang membutuhkan dukungan layanan perbankan (*financing*). Produk-produk perbankan yang masih relatif tradisional berpotensi dikembangkan menjadi makin kompleks.

Selain itu, inflasi yang rendah membuka ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan sehingga berimbas pada suku bunga kredit yang lebih rendah. Suku bunga yang rendah berpotensi meningkatkan permintaan kredit perbankan di



Agus D.W. Martowardojo; masih lemah

tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif membaik.

Bank Indonesia (BI) juga menilai, pertumbuhan kredit pada 2017 akan membaik jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan kredit pada 2016 yang dipatok di kisaran 7%-9%. Hal itu sejalan dengan permintaan kredit yang diprediksi mulai meningkat pada 2017.

Menurut Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, pertumbuhan kredit pada 2017 akan berada di angka *double digit*. Meski demikian, realisasi pertumbuhan kredit pada 2017 bergantung pada pertumbuhan ekonomi. “Kami perkirakan, pertumbuhan kredit akan di kisaran 11% pada 2017. Saya tentu diskusi, yang ada itu tergantung pada hasil pembahasan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2017 juga,” terangnya.

Proyeksi pertumbuhan kredit tersebut seiring dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 yang sebesar 5,1%. Menurut Agus, jika pertumbuhan ekonomi tahun depan di atas 5,1%, pertumbuhan kredit diperkirakan berada di atas 11%.

“Kita lihat pertumbuhan kredit itu ada di kisaran 12% lebih kalau seandainya pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 5,2%. Namun, kalau pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 5,1%, mungkin pertumbuhan kredit sedikit lebih rendah,” tuturnya.

Agus mengungkapkan, pertumbuhan kredit pada 2016 diproyeksikan hanya 7%-9% lantaran kondisi ekonomi global yang masih lemah. Hal itu mengakibatkan ekspor dalam negeri menurun, terutama ekspor komoditas yang harganya tengah melemah, sehingga berdampak pada perekonomian nasional. ■

# Properti dan Infrastruktur Bisa Menjadi Motor

Dibandingkan dengan 2016, angka pertumbuhan kredit pada 2017 diperkirakan lebih baik. Memang, ada beberapa sektor yang masih belum pulih. Properti dan infrastruktur diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan kredit pada tahun mendatang.

**B**isnis perbankan pada 2017 diproyeksikan lebih baik jika dibandingkan dengan 2016. Angka pertumbuhan kredit perbankan tahun depan pun diperkirakan berada di atas angka pertumbuhan kredit tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2017 berada di kisaran 12%-14%. Sementara, Bank Indonesia (BI) memprediksi, pertumbuhan kredit tahun depan berada di kisaran 11%, tapi bisa lebih tinggi lagi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi 5,1%.

Untuk mencapai kinerja bisnis yang sesuai dengan target dan menjaga kesinambungan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi, para pelaku usaha di sektor perbankan harus jeli melihat peluang dari setiap sektor bisnis dan mampu memitigasi risiko dengan baik demi mencegah peningkatan kredit macet. Menurut Aviliani, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, pada tahun mendatang beberapa sektor ekonomi memang diprediksi masih belum pulih, terutama yang terkait dengan komoditas. Walau demikian, ada beberapa sektor lain yang diperkirakan tumbuh lebih baik pada 2017.

“Sektor pertanian dan pertambangan masih sulit diharapkan untuk pulih tahun depan. (Sektor) tambang baru *recovery* pada 2018-2019, menunggu *smelter* jadi. Itu (*smelter*) jadi usaha kecil menengah (UKM) muncul. Kredit bermasalah perbankan juga besar di situ (pertambangan),” terangnya dalam “Seminar Nasional Infobank Outlook 2017” di Jakarta, akhir Oktober 2016.

Aviliani mengungkapkan, ada dua sektor yang cukup bagus dan bisa menjadi penggerak bisnis perbankan pada tahun depan, yakni sektor properti dan infrastruktur. “Kelas



Aviliani; beberapa sektor belum pulih

menengah terkait dengan Program Sejuta Rumah. Lalu, kedua, orang asing terkait kepemilikan properti. Apabila diimplementasikan, bisa menjadi daya tarik sektor properti,” jelasnya.

Berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan properti diharapkan bisa mendorong perekonomian. Misalnya, Paket Kebijakan Ekonomi V lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. Selain itu, dihapusnya pengenaan pajak berganda melalui PMK tersebut sehingga dana investasi real estate (DIRE) diharapkan meningkat.

Di industri keuangan, OJK bersama BI juga telah merelaksasi aturan *loan to value (LTV)* kredit properti, dalam hal ini kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) sehingga uang muka atau *down payment (DP)* yang harus dibayar konsumen hanya 15%. Melalui kebijakan relaksasi tersebut, *supply and demand* di sektor properti diharapkan meningkat, terlebih dengan adanya Program Sejuta Rumah yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, di sektor infrastruktur, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur, yang tentu saja melibatkan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan, selain dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Kedua sektor yang notabene saling terkait itu diharapkan memberi peluang bagi industri perbankan. Di luar itu, masih ada beberapa sektor lain yang juga potensial asalkan perbankan memiliki kompetensi di sektor tersebut dan mampu memitigasi risiko dengan baik. ■

# Melonggarkan Ruang Bisnis UMKM

Industri perbankan wajib menyalurkan kredit UMKM dengan besaran tertentu secara bertahap demi meningkatkan peran UMKM dalam struktur perekonomian bangsa. Meski belum semua bank memenuhi ketentuan tersebut, setidaknya *concern* perbankan terhadap UMKM terus terjaga.

**S**atu hal yang menarik saat membicarakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah kemampuannya bertahan pada saat krisis. Krisis ekonomi 1998 menjadi bukti betapa tangguhnyanya sektor ini. Saat usaha korporasi harus berjuang supaya bisnisnya terus berjalan, sektor UMKM justru menunjukkan daya tahannya.

Karena itu, sektor UMKM diharapkan menjadi penyokong perekonomian bangsa. Regulator pun membuat beragam skema pembiayaan agar UMKM mendapat ruang yang lebih longgar untuk tumbuh. Salah satunya adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan sistem kredit berpenjaminan yang digagas pemerintah Indonesia dengan melibatkan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Ide pemerintah Indonesia ini menarik perhatian pemerintah Amerika Latin.

Dalam Forum Penjaminan dan Pembiayaan UMKM Amerika Latin ke-21 (XXI IBERO – Americano Forum of Guarantee and Finance to SMEs) di Santiago, Chile, pada 20–21 Oktober 2016, delegasi Indonesia yang diwakili manajemen Perum Jamkrindo dan Kementerian Koperasi dan UKM membagikan pengalaman tentang bagaimana Indonesia mengelola UMKM-nya. Beberapa negara peserta forum tersebut menyatakan keinginannya belajar dari Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM.

Selain program KUR, untuk memacu bisnis UMKM, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) pada 2012 menggulirkan kebijakan yang mengatur persentase yang wajib dipenuhi bank umum dalam mengucurkan kredit UMKM dan bantuan teknis yang dapat diberikan ke sektor tersebut. Beberapa poin dalam kebijakan tersebut diubah pada 2015, yang intinya bank umum wajib menyalurkan kredit ke sektor UMKM minimal 20% dari total kredit atau pembiayaan.

Ketentuan tersebut diberlakukan secara bertahap. Pada 2014 rasio kredit UMKM terhadap total kredit sesuai dengan kemampuan masing-masing bank umum. Selanjutnya, pada 2015 rasio kredit UMKM terhadap total kredit minimal 5%, pada 2016 minimal 10%, pada 2017 minimal 15%, dan pada 2018 minimal 20%.



Meski kebijakan penyaluran kredit UMKM itu sudah digulirkan pada 2012, berdasarkan catatan BI, pada Agustus 2016 baru 100 bank yang memenuhi rasio 10%. Menurut Agus Martowardojo, Gubernur BI, diperkirakan masih ada bank yang bisa mencapai target 10% hingga akhir 2016. Untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pembiayaan UMKM, beberapa bank membangun akses layanan yang menysasar sektor tersebut.

Bank DKI, misalnya. Selain menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp1,5 miliar dalam bentuk Monas 25, Bank DKI menyediakan *mobile collection* untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi. Monas 25 diberikan kepada pedagang di pasar-pasar yang dikelola PD Pasar Jaya. Menurut Kresno Sediarsi, Direktur Utama Bank DKI, hal itu dilakukan Bank DKI untuk meningkatkan peran intermediasinya di sektor UMKM.

## Kinerja Kredit UMKM

Di tengah melambatnya kredit perbankan, kredit ke sektor UMKM pun menunjukkan tren yang sama. Namun, pada Agustus 2016, saat kredit perbankan tumbuh 6,65% dibandingkan dengan Agustus 2015 (*year on year*), kredit UMKM tercatat tumbuh 8,90%.

Dari total kredit ke sektor UMKM sebesar Rp773,30 triliun per Agustus 2016, bank pemerintah masih mendominasi kucuran kredit ke sektor tersebut. Pasar kredit UMKM yang dikuasai bank pemerintah tercatat 54,93%. Jaringan kantor yang dimiliki bank pemerintah ditengarai membuat kelompok bank ini lebih mudah masuk ke sektor UMKM.

Di antara empat kelompok bank yang menjadi dasar pelaporan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kelompok bank asing dan campuran adalah kelompok yang minim bermain di sektor UMKM. Pada Agustus 2016 kelompok bank tersebut hanya menguasai 1,86% dari total pangsa kredit UMKM.

Pada pengujung 2015 kelompok bank asing dan campuran pun mencatatkan pertumbuhan kredit yang kurang memuaskan. Bila kucuran kredit UMKM kelompok bank lain menunjukkan angka pertumbuhan positif—bank pemerintah 12,10%, bank pembangunan daerah (BPD) 2,10%, dan bank swasta nasional 10,79%—kucuran kredit UMKM kelompok bank asing dan campuran malah turun 14,19%. Tren menurunnya kredit UMKM di kelompok bank asing dan campuran terus berlanjut hingga Agustus 2016. Bila dibandingkan dengan Agustus 2015, kucuran kredit UMKM kelompok bank tersebut pada Agustus 2016 turun 27,30%.

BI juga mencatat, banyak kantor bank asing yang belum memenuhi ketentuan persentase 10% kredit UMKM terhadap total kreditnya. Yunita Resmi Sari, Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI, mengungkapkan, *networking* kantor bank asing di Tanah Air yang terbatas dan kapasitas kegiatan mereka tidak di UMKM menyebabkan penetrasi kredit UMKM bank asing masih rendah.

Merespons kondisi tersebut, BI akan mengkaji penyesuaian perhitungan pemenuhan kredit UMKM bagi kantor bank asing yang statusnya sebagai kantor cabang dan pusatnya berada di luar negeri. Upaya BI tersebut diharapkan meningkatkan peran bank asing dalam menggerakkan UMKM di Indonesia.

Meski penetrasi kredit UMKM kelompok bank asing dan campuran paling rendah, kelompok bank ini mampu menjaga kualitas kreditnya bila dibandingkan dengan kelompok BPD. Lihat saja, *non performing loan (NPL)* kredit UMKM kelompok bank asing dan campuran pada Agustus 2016 berada di posisi 7,58%, sedangkan *NPL* kredit UMKM BPD pada periode tersebut tercatat 10,59%.

## KINERJA KREDIT UMKM

KETERANGAN	DES 2012	DES 2013	DES 2014	DES 2015	AGS 2015	AGS 2016	Δ YTD (%)
<b>POSISI (RP MILIAR)</b>							
BANK PERSERO	242.861	304.751	341.804	383.166	355.179	424.734	10,85
BPD	45.082	46.896	50.837	51.858	50.987	55.268	6,58
BANK SWASTA NASIONAL	228.991	245.101	261.365	289.578	284.193	278.945	-3,67
BANK ASING & CAMPURAN	9.463	12.076	17.714	15.199	19.739	14.351	-5,58
TOTAL	526.397	608.823	671.721	739.801	710.098	773.298	4,53
<b>PANGSA (%)</b>							
BANK PERSERO	46,14	50,06	50,88	51,79	50,02	54,93	
BPD	8,56	7,70	7,57	7,01	7,18	7,15	
BANK SWASTA NASIONAL	43,50	40,26	38,91	39,14	40,02	36,07	
BANK ASING & CAMPURAN	1,80	1,98	2,64	2,05	2,78	1,86	
<b>Δ YOY (%)</b>							
BANK PERSERO	9,08	25,48	12,16	12,10	10,49	19,58	
BPD	43,97	4,02	8,40	2,01	0,12	8,40	
BANK SWASTA NASIONAL	17,89	7,04	6,64	10,79	9,55	-1,85	
BANK ASING & CAMPURAN	-5,10	27,61	46,69	-14,19	17,20	-27,30	
TOTAL	14,89	15,66	10,33	10,14	9,47	8,90	
<b>NPL KREDIT UMKM (%)</b>							
BANK PERSERO	3,74	3,40	3,55	3,51	4,74	4,14	
BPD	5,79	6,32	9,86	11,28	11,55	10,59	
BANK SWASTA NASIONAL	2,23	2,42	2,93	3,35	3,44	3,87	
BANK ASING & CAMPURAN	2,20	2,12	1,92	5,36	2,50	7,58	
TOTAL	3,23	3,21	3,75	4,03	4,65	4,57	
<b>NPL KREDIT MIKRO (%)</b>							
BANK PERSERO	1,82	1,69	1,72	1,69	2,27	2,02	
BPD	4,90	7,48	11,60	8,49	10,95	5,43	
BANK SWASTA NASIONAL	3,53	3,41	3,09	3,11	3,72	4,36	
BANK ASING & CAMPURAN	6,46	9,44	3,54	11,97	0,96	9,84	
TOTAL	2,49	2,46	2,58	2,28	3,02	2,44	
<b>NPL KREDIT KECIL (%)</b>							
BANK PERSERO	4,78	4,01	4,07	3,92	5,45	4,37	
BPD	6,29	6,30	7,02	8,17	9,00	9,02	
BANK SWASTA NASIONAL	3,86	4,95	5,42	5,60	5,92	6,24	
BANK ASING & CAMPURAN	8,61	2,16	2,62	3,40	2,06	19,33	
TOTAL	4,74	4,48	4,68	4,74	5,96	5,28	
<b>NPL KREDIT MENENGAH (%)</b>							
BANK PERSERO	4,07	4,20	4,81	5,21	6,76	6,75	
BPD	5,63	5,71	12,63	16,58	15,41	14,57	
BANK SWASTA NASIONAL	1,61	1,71	2,38	2,91	2,91	3,38	
BANK ASING & CAMPURAN	1,82	2,07	1,88	5,43	2,58	6,63	
TOTAL	2,57	2,72	3,67	4,40	4,61	5,16	

Keterangan:

Δ YOY: pertumbuhan year on year;

Δ YTD: pertumbuhan year to date;

NPL: non performing loan;

Sumber: OJK, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

Sektor UMKM banyak yang bergerak di industri kreatif, khususnya kerajinan tangan. Industri semacam itu tersebar di seluruh Indonesia dan banyak dibiayai BPD. Di satu sisi, itu menjadi berkah bagi BPD yang lebih menguasai pasar di wilayahnya. Namun, bila tak berhati-hati, pembiayaan UMKM bisa menjadi bumerang bagi BPD dalam bentuk tingginya *NPL*.

Ke depan UMKM diharapkan lebih banyak berperan dalam perekonomian bangsa. Karena, sektor ini terbukti cukup tahan terhadap krisis. Dan, itu seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi perbankan agar tidak ragu lagi mengucurkan kredit ke sektor UMKM. ■

# Menanti Beleid NPG

BI akan segera melansir PBI terkait dengan NPG, yang akan mengatur sistem interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Tanah Air. Dengan diluncurkannya NPG, sistem pembayaran diharapkan makin efektif dan efisien.



Peningkatan efisiensi dan efektivitas perbankan, khususnya dalam sistem pembayaran, menjadi salah satu perhatian utama Bank Indonesia (BI). Demi mendukung langkah tersebut, bank sentral bersiap diri untuk membangun prinsipal lokal sistem pembayaran atau *national payment gateway (NPG)*. Adapun, payung hukum yang dikeluarkan berupa peraturan BI (PBI).

NPG dikembangkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan sistem pembayaran yang efisien dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Menurut BI, NPG adalah infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik.

Prinsip yang dianut BI dalam mengembangkan NPG adalah mempertimbangkan akseptansi *stakeholders*, *time to market*, *settlement*, keamanan, kompetisi yang sehat, dan mengedepankan kepentingan nasional. Karena itu, *conceptual design* BI dalam NPG lebih bersifat *institutional arrangement* untuk memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas.

Perry Warjiyo, Deputy Gubernur BI, mengaku, pihaknya masih melakukan persiapan untuk menghadirkan NPG di tengah-tengah industri perbankan nasional dalam waktu dekat, tepatnya pada akhir tahun ini. Melalui NPG, tambah Perry,

seluruh transaksi di Tanah Air dari berbagai *provider* akan saling terkoneksi.

“Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan kebijakan NPG. Jadi, seluruh pembayaran yang ada di Indonesia dari berbagai *provider* akan kami sambungkan, yang kami sebut *interconnectivity* dan *interoperability*,” jelasnya.

Tak hanya meningkatkan efisiensi, NPG juga menjadi salah satu strategi BI dalam menghadapi krisis global. Salah satu strategi yang dimaksud ialah meningkatkan intermediasi dan menyiapkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi persaingan bebas sehingga bisa meningkatkan daya saing.

Saat ini BI tengah menyiapkan *blue print* mengenai NPG guna mengantisipasi peningkatan transaksi nontunai. Melalui NPG, pemerintah akan menggabungkan pembayaran, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, semua pembayaran, baik *automatic teller machine (ATM)*, *mobile phone*, maupun internet, akan menjadi satu kesatuan.

Masih menurut Perry, penerapan NPG di Tanah Air menjadi isu penting karena transaksi yang dilakukan selama ini selalu diselesaikan di luar negeri. Melalui sistem tersebut, diharapkan semua transaksi yang ada di dalam negeri bisa diselesaikan juga di dalam negeri.

Saat ini ada tiga operator pembayaran yang dikenal luas, yaitu Artajasa yang mengelola ATM Bersama, Rintis Sejahtera yang mengelola Prima, dan Daya Network Lestari yang mengelola ALTO. Melalui *provider* yang berbeda tadi, lanjut Perry, pelaksanaan pembayaran akan lebih mudah dilakukan di dalam jaringan *NPG*.

Sejauh ini pihak bank sentral sudah melakukan kajian bersama dengan beberapa pihak terkait, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama ini realisasi *NPG* masih terbentur keberadaan perusahaan-perusahaan *payment gateway* yang sudah lama berdiri. Lambatnya realisasi *NPG* terjadi karena banyaknya pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran, yakni perusahaan-perusahaan, perbankan, konsumen, serta perusahaan penyedia *ATM*, mesin *electronic data capture (EDC)*, dan lain-lain.

### Kerja Sama Bank BUMN

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) mendukung keinginan bank sentral untuk segera menghadirkan *NPG*. Hal itu diyakini akan makin meningkatkan efisiensi transaksi perbankan, terutama di empat bank yang tergabung di dalamnya. Dalam sinergi tersebut, Himbara menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk membentuk perusahaan prinsipal yang akan memfasilitasi proses *switching* transaksi di antara bank-bank anggota Himbara.

Rini M. Soemarno, Menteri BUMN, mengatakan, pembentukan ekosistem *NPG* merupakan salah satu inisiatif strategis yang menyokong visi pemerintahan demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan asas gotong-royong. Sehingga, bank-bank pemerintah bisa saling bekerja sama mewujudkan *NPG*.

Sementara itu, menurut Asmawi Syam, Ketua Himbara yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sinergi dalam sistem pembayaran dan perwujudan *NPG* bisa mendorong penghematan dan efisiensi bank hingga sebesar Rp6,8 triliun per tahun. Sejauh ini, lanjut Asmawi, perbankan harus membuat *ATM* dan jaringannya secara sendiri-sendiri sehingga tidak efisien. Bank setidaknya membutuhkan dana Rp100 juta untuk pembelian satu unit *ATM*.

Dengan adanya sinergi tersebut, lanjut Asmawi, operasional *ATM* bisa dilakukan secara bersama-sama dan lebih hemat. “Kalau beli sendiri Rp100 juta, sekarang bisa dibagi empat—berarti masing-masing Rp25 juta. Itu penghematan. Kami bisa menghemat tiga per empatnya dan hanya bayar seperempatnya, yang dihemat Rp75 juta,” paparnya.

Untuk tahap awal, pembentukan entitas perusahaan yang akan menjadi prinsipal dilakukan oleh Telkom melalui penyertaan modal awal yang bersifat sementara hingga terbentuknya *holding* BUMN keuangan. Selanjutnya, *holding*



Perry Warjiyo; saling terkoneksi

BUMN keuangan akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan prinsipal.

Sebagai salah satu anggota Himbara, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk siap untuk menyukseskan agenda *NPG* tersebut. Menurut direksi bank ini, penerapan *NPG* merupakan sebuah langkah maju bagi perbankan nasional dalam menyatukan sistem transaksi secara nasional.

Maryono, Direktur Utama BTN, mengatakan, selain bisa melakukan efisiensi, kepentingan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik akan terjawab. Biaya transaksi yang dikeluarkan nasabah pun menjadi sangat murah. Tak hanya meningkatkan efisiensi dengan *sharing* infrastruktur sistem pembayaran, *NPG* juga diharapkan dapat meningkatkan kontrol atas transaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap prinsipal asing.

“Ini sebagai wujud dari sinergi BUMN, dan kami bank-bank BUMN bersama Telkom melakukan sinergi

dalam pembentukan *NPG*. Ini juga bentuk realisasi mendorong BUMN menjadi agen pembangunan,” jelasnya.

Data BI menunjukkan, jumlah transaksi kartu debit naik 153% dari 138 juta transaksi pada 2011 menjadi 349 juta transaksi pada 2015. Jumlah itu diperkirakan tumbuh 217% menjadi 1,1 miliar transaksi pada 2020. Sementara, jumlah transaksi kartu kredit pada 2015 tercatat 281 juta transaksi, tumbuh 34% dibandingkan dengan 2011 dan diperkirakan meningkat 45% menjadi 407 juta transaksi pada 2020.

*NPG* akan menciptakan efisiensi di dalam sistem pembayaran nasional. Bank-bank BUMN juga saat ini sedang bekerja sama untuk mewujudkan sinergi infrastruktur *ATM* dan *EDC*. Pada 2016 diharapkan 10.000 *ATM* dan 10.000 *EDC* bank-bank BUMN sudah beroperasi. ■

**Prinsip yang dianut BI dalam mengembangkan *NPG* adalah mempertimbangkan akseptansi *stakeholders*, *time to market*, *settlement*, keamanan, kompetisi yang sehat, dan mengedepankan kepentingan nasional.**

**Adrian Panggabean,  
Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk**

# Tiga Tantangan Perbankan Nasional

Perkembangan ekonomi, globalisasi, dan peningkatan penetrasi perbankan saat ini menjadi tantangan pelaku industri perbankan, mulai dari sumber daya manusia, inovasi produk, layanan, hingga mitigasi risiko.

**K**etidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan industri perbankan nasional. Menurut Adrian Panggabean, *Chief Economist, Treasury and Capital Market Bank CIMB Niaga*, setidaknya tantangan bagi perbankan terbagi menjadi tiga, yakni dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Dalam jangka panjang tantangannya adalah mengembangkan jasa layanan perbankan sehingga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, kini dikembangkan program *financial inclusion*. Sebagai informasi, berdasarkan data, hingga saat ini hanya sekitar 36% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan jasa perbankan. Terkait dengan program tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menargetkan 75% penduduk Indonesia bisa mengakses layanan jasa perbankan pada 2019.

Kemudian, dalam jangka menengah, dua hingga tiga tahun ke depan, tantangannya adalah sinkronisasi terkait dengan implementasi Basel III. Saat ini perbankan nasional baru sampai pada implementasi Basel II. “Kalau Basel III itu sudah diimplementasikan, ada dua hal yang muncul sebagai fitur paling penting dari Basel III, yaitu kecukupan modal yang bisa lebih besar dan pengendalian risiko. Sejak krisis global 2008-2009, ketidakpastian global—dan di sektor industri keuangan berlanjut terus sampai saat ini—memunculkan risiko keuangan, baik yang sifatnya sistemik maupun nonsistemik ataupun yang sifatnya fluktuatif, pasar, maupun nonpasar. Ini membutuhkan pengendalian risiko yang terus-menerus,” ujar Adrian.

Sementara itu, tantangan dalam jangka pendek adalah terganggunya kinerja industri perbankan secara umum akibat

ketidakpastian ekonomi yang masih berlanjut hingga sekarang. “Jadi, relatif tingginya kredit bermasalah dibandingkan dengan secara historis, lalu pertumbuhan kredit yang relatif rendah, itu adalah tantangan yang dihadapi industri perbankan nasional saat ini. Jadi, kira-kira begitu,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana kondisi perbankan saat ini? Apa strategi yang ditempuh pelaku perbankan untuk menghadapinya? Berikut wawancara *Probank* dengan Adrian Panggabean. Petikannya:

### **Bagaimana kondisi industri perbankan sampai dengan akhir tahun ini?**

Dengan melihat kondisi terkini, sampai dengan akhir tahun, saya rasa, industri kita masih akan bergumul dengan dampak yang muncul dari perlambatan ekonomi. Karena, secara global, tampaknya belum ada katalis yang bisa membantu menjernihkan ketidakpastian ekonomi.

Sekarang ketidakpastian ekonomi lebih disebabkan oleh apa yang terjadi di lingkungan global. Sampai dengan akhir 2016, industri perbankan masih akan dihadapkan pada masalah rasio *non performing loan (NPL)* dan pertumbuhan kredit yang rendah. Walaupun begitu, saya yakin situasinya sangat terkendali. Industri perbankan kita jauh lebih kuat dibandingkan dengan lima atau sepuluh tahun yang lalu.

### **Bagaimana dengan prospek 2017? Apa saja tantangannya?**

(Tahun) 2017 menarik. Ada beberapa hal yang penting untuk dicermati. Satu, sebetulnya pada 2017 kondisi global (faktor eksternal) tidak akan banyak berubah dibandingkan dengan 2016.

Perekonomian Amerika Serikat akan terus membaik, tapi untuk membaik secara signifikan dan mengubah kondisi global rasanya belum akan terjadi pada 2017. Eropa masih akan begitu-begitu saja. Jepang juga masih sibuk mengatasi deflasi.

Lalu, China (Tiongkok), perlambatan ekonomi akan terus berlanjut karena mereka sedang melakukan *rebalancing* di dalam perekonomiannya sehingga efeknya adalah penurunan permintaan produk-produk ekspor dari Indonesia. Sehingga, ekspor mungkin belum bisa diharapkan sebagai motor pertumbuhan (ekonomi) Indonesia.

Investasi tampaknya juga belum bisa dijadikan sebagai motor pertumbuhan (ekonomi) kita karena realisasi investasi *foreign direct investment* sampai dengan akhir tahun atau paling tidak hingga akhir kuartal/triwulan ketiga masih cukup rendah. Realisasi dari investasi domestik malah pertumbuhannya negatif.

Pada 2017 harapannya adalah otoritas moneter bisa menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut. Mungkin tidak banyak, tapi dari penurunan suku bunga *BI 7-Days Reverse*

*Repo Rate* itu diharapkan biaya modal yang dihadapi oleh peminjam atau *cost of capital*-nya akan menjadi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan prospek labanya.

Jadi, dilihat dari sudut pandang itu, kebijakan moneter yang menurunkan tingkat suku bunga diharapkan bisa mulai membangkitkan pertumbuhan kredit. Namun, mungkin itu hanya akan terjadi pada semester kedua 2017. Jadi, walaupun tantangannya lebih kurang sama seperti 2016, dengan adanya stimulus kebijakan moneter dan dengan prospek realokasi pengeluaran di sisi fiskal, mungkin kita akan melihat mulai ada sedikit *pick up*, tapi mulai semester kedua.

### **Strategi apa saja yang mesti dilakukan pelaku perbankan untuk menghadapi globalisasi pada masa mendatang?**

Itu pertanyaan yang menarik. Buat saya, globalisasi itu artinya *interdependence*, saling ketergantungan. Makin luasnya cakupan globalisasi, akan membuat saling ketergantungan makin tinggi pula. Artinya, sistem perbankan atau industri perbankan makin erat masuk ke dalam jaringan global dari sistem pembayaran, sistem perdagangan, dan transaksi aset.

Di satu sisi, itu berita baik buat perbankan karena makin terkait eratnya sistem pembayaran, perdagangan, maupun transaksi aset global, maka itu membuka potensi bisnis. Sistem perbankan pada esensinya memfasilitasi proses intermediasi antarpelaku ekonomi. Jadi, globalisasi akan membuka prospek bisnis. Cuma, memang, ada juga tantangannya. Globalisasi itu juga berarti kita masuk ke dalam *global value chain*. Agar kompetitif, kita harus punya SDM (sumber daya manusia) yang jauh lebih andal.

Intinya, pertama, SDM harus lebih kuat. Kedua, kita harus punya budaya *risk awareness* karena makin terintegrasinya kita dengan sistem global, maka risikonya muncul dari mana-mana. Ketiga, klien akan makin banyak dan beragam, tapi di situ justru proses pemilihan klien juga menjadi sangat penting.

Terakhir, globalisasi akan memunculkan sumber-sumber *revenue* yang baru, tapi kita juga harus jeli untuk melihat dan menyeimbangkan. Jeli karena globalisasi itu membuka ruang terhadap diversifikasi produk. Nah, itu semua tantangan, tapi sebetulnya itu adalah *good challenge*.

### **CIMB Niaga sendiri bagaimana?**

Untuk CIMB Niaga, kami punya lima fokus untuk memperkuat kinerja bank ini ke depannya. Yang pertama, penguatan *risk management*. Kedua, agar bisa melayani lebih banyak klien, *cost of fund* harus murah. Jadi, CIMB Niaga akan memperbesar porsi *low cost funding*.

Ketiga, agak terkait dengan tantangan *financial inclusion* tadi, CIMB Niaga akan memperkuat layanan *digital*. Keempat, fokus untuk memperkuat layanan di segmen UMKM (usaha

**Buat saya, globalisasi itu artinya *interdependence*, saling ketergantungan. Makin luasnya cakupan globalisasi, akan membuat saling ketergantungan makin tinggi pula. Artinya, sistem perbankan atau industri perbankan makin erat masuk ke dalam jaringan global dari sistem pembayaran, sistem perdagangan, dan transaksi aset.**



mikro, kecil, dan menengah). Penguatan dukungan kepada UMKM ini adalah salah satu sarana untuk kami bisa menjadi bank yang berperan sebagai *agent of development*. Kelima, pengendalian biaya.

### **Seperti apa persiapan dan kekuatan perbankan nasional menghadapi tren penurunan kredit dan ketatnya likuiditas?**

Saya perlu sedikit klarifikasi. Problem kita itu bukan pada ketatnya likuiditas. Di sistem perbankan nasional likuiditas rasanya cukup. Masalahnya, likuiditas ini tersegmentasi di antara bank. Di sebagian bank mungkin likuiditasnya banyak, tapi di bank lainnya mungkin likuiditasnya kurang. Namun, secara agregat, likuiditas cukup banyak. Di CIMB Niaga rasanya tidak masalah.

Penurunan kredit, saya rasa perbankan kita saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan 1997-1998 atau 2008. Jadi, dalam menghadapi tren penurunan kredit seperti ini kita jauh lebih mampu. Kita lihat saja, *NPL* itu naik, tapi *NPL* kenaikannya tidak sampai *double digit* seperti dulu. Ketentuan makroprudensial dan mikroprudensial dari OJK dan BI-lah yang membuat industri perbankan kita saat ini jauh lebih sehat.

### **Bagaimana perbankan nasional menghadapi kebijakan *tax amnesty*?**

Sistem perbankan nasional adalah agen yang memfasilitasi kebijakan pemerintah. Jadi, sejauh pemerintah itu memberikan mandat buat kami di industri perbankan untuk memfasilitasi pasti akan kami lakukan sebaik-baiknya. Dan, memang, sampai dengan sejauh ini tidak terdengar ada masalah dengan layanan perbankan terkait dengan *tax amnesty* ini.

### **Bagaimana posisi CIMB Niaga dalam peta persaingan perbankan? Bagaimana pula bank ini menghadapi penurunan kredit, ketatnya likuiditas, dan *tax amnesty*?**

Menurunnya pertumbuhan kredit memang menyebabkan turunnya *revenue* bank. Sehingga, mau tidak mau, sumber penerimaan harus berpaling pada *fee based income*. Sumber lainnya tentu berasal dari jasa *liquidity management*, yang artinya adalah *treasury operations*. Namun, yang jauh lebih penting lagi, dalam situasi kredit itu menurun harusnya penekanan ada pada *cost control*.

Dari banyak hal yang ada di tangan, yang sepenuhnya ada di dalam kendali kami adalah pengendalian biaya. Jadi, kunci yang ketiga, seperti yang saya sampaikan di atas, adalah *cost control*. Yang keempat, kalau kita bicara soal jasa layanan perbankan, apalagi yang sifatnya *fee based*, tentunya solusi keuangan dalam bentuk produk perbankan adalah kunci. Produk yang saya maksud bukan hanya terkait dengan



diversifikasi produk, melainkan juga kualitas produk.

### **Pandangan Anda mengenai pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah dan regulator terhadap perkembangan industri?**

Sejauh ini saya melihat ada tarik dan ulur kebijakan, dalam artian kebijakan pemerintah dan regulator terlihat merespons siklus bisnis. Misalnya, pada saat sektor properti itu sudah menjadi terlampau panas, pemerintah mengeluarkan kebijakan mikroprudensial yang terkait dengan *LTV (loan to value)*. Demikian sebaliknya saat terjadi penurunan siklus perekonomian, maka kebijakan mikroprudensial sedikit dilonggarkan.

Kebijakan makroprudensial, saya rasa, juga mengikuti siklus bisnis yang sedang terjadi. Jadi, *so far* saya lihat kebijakan pemerintah

kondusif terhadap industri perbankan. Jadi, kalau Anda tanya bagaimana pandangan saya terhadap kebijakan, secara umum saya melihatnya sangat positif.

### **Peluang apa saja yang dimiliki perbankan nasional dalam membangun perekonomian nasional ke depan?**

Ini pertanyaan menarik karena terkait dengan peran perbankan nasional sebagai *agent of development*. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM itu mungkin antara dua pertiga sampai dengan 70%. Artinya, jumlah keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM ini sangat besar. Memfasilitasi perkembangan UMKM artinya bukan sekadar retorika bisnis. Tapi, membangun sektor UMKM sebetulnya adalah bagian dari peran sektor industri perbankan terhadap pembangunan Indonesia.

Jadi, salah satu fokus Bank CIMB Niaga adalah UMKM. Kedua, peluang untuk ikut serta membangun perekonomian Indonesia juga didapatkan lewat pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, CIMB Niaga ingin berperan juga dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

### **Pandangan Anda terkait dengan suku bunga *single digit* dan pendalaman pasar keuangan?**

Suku bunga *single digit* itu sebetulnya suatu hal yang akan menguntungkan semua orang. Pemerintah akan gembira, korporasi akan senang karena biaya modal makin rendah, bank juga akan makin efisien. Lewat suku bunga *single digit*, perbankan nasional akhirnya akan bisa berkompetisi secara regional, bahkan mungkin secara global. Bila pendalaman pasar keuangan kita berhasil, ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, prospek perkembangan industri perbankan akan sangat cerah dalam jangka menengah dan jangka panjang. ■

# Mengawal SDM Perbankan 2020

Saat ini SDM perbankan bersiap menghadapi pemberlakuan integrasi sektor perbankan dan jasa keuangan di kawasan ASEAN pada 2020. Perbanas menyiapkan usulan mengenai pengembangan SDM menghadapi pemberlakuan kebijakan tersebut.



**P**erubahan kebijakan ekonomi di suatu wilayah biasanya akan memunculkan kekhawatiran bagi sebagian kalangan, antara lain tenaga kerja, sebagai salah satu pelaku ekonomi. Sebagai contoh ketika dibentuk Uni Eropa pada 1992 muncul kekhawatiran akan terjadi pergerakan sumber daya manusia (SDM) antarnegara Uni Eropa. Mau tidak mau SDM lokal suatu negara Uni Eropa harus bersaing dengan SDM negara lain sesama anggota Uni Eropa.

Kekhawatiran yang sama pun terjadi pada SDM Indonesia dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Siap tidak siap kita harus menghadapi sistem perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Yang jelas, konsekuensi dari kebijakan tersebut, sesama negara anggota ASEAN akan *borderless*. Tak ada lagi hambatan arus barang maupun jasa antarasesama negara ASEAN. Semua jenis barang dan jasa yang sudah disepakati bebas terdistribusi atau diperdagangkan di kawasan ASEAN.

Dalam hubungannya dengan bisnis perbankan, para profesional sektor perbankan menyadari bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang dalam menghadapi MEA, meski integrasi sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya baru diberlakukan pada 2020. Persiapan yang dimaksud di antaranya soal SDM.

Dalam kaitannya dengan itu, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) pada 13 Oktober 2016 menggelar "Indonesia Banking Human Capital Conference" di Hotel

Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Acara yang mengangkat tema "Persiapan SDM Perbankan Indonesia dalam ASEAN Financial Service & Banking Integration 2020" itu mendapat respons positif pelaku bisnis perbankan, khususnya mereka yang menangani masalah SDM.

Hal penting yang harus menjadi catatan SDM perbankan dalam menghadapi integrasi perbankan 2020 ialah kompetensi. Ini menjadi syarat mutlak bila bankir Indonesia ingin bisa mengikuti persaingan di kancah bisnis perbankan, baik regional maupun global. Seperti yang disampaikan Maryono, Wakil Ketua Umum I Perbanas, dalam sambutannya di konferensi tersebut, saat ini Perbanas sedang berupaya melakukan percepatan kompetensi tenaga kerja perbankan, percepatan akses kompetensi, dan pengendalian tenaga kerja asing.

Membang, seperti dikatakan Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya, pengembangan SDM perbankan lebih *establish*. Karena nantinya antarsektor jasa keuangan harus terintegrasi, ke depan, pengembangan SDM disesuaikan dengan kebutuhan.

Konferensi itu sendiri terbagi dalam dua sesi diskusi. Sesi pertama menghadirkan pembicara Megawati Santoso, *Vice Chair of ASEAN Qualification Reference Framework*; Hernawan B. Sasongko, *Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA OJK*; Suroso, *Ketua Harmonisasi dan Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)*; dan Mary Chua, *Director of Talent & Rewards Willis Towers Watson*. Moderator sesi pertama ialah Tri Joko Prihanto, *Anggota Bidang Governance, Pendidikan, dan Pengembangan SDM Perbanas*.

Sesi kedua yang dipandu Ahmad Siddik Badruddin, *Ketua Bankers Association for Risk Management (BARa)*, menghadirkan pembicara Zulkifli Zaini, *Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI)*; Jahja Setiaatmadja, *Direktur Utama Bank Central Asia*; Batara Sianturi, *CEO Citibank Indonesia*; Sanjay N. Bharwani, *SEVP Bank Mandiri*; dan Tri Joko Prihanto, *Anggota Bidang Governance, Pendidikan, dan Pengembangan SDM Perbanas*. Menutup acara konferensi, Perbanas menyampaikan usulan pemikiran untuk standar kualifikasi SDM perbankan di Indonesia. ■

# Membangun SDM Berkualitas

Globalisasi tak bisa dihindari. Para pelaku industri harus menyiapkan diri untuk bisa bersaing dengan pelaku industri lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya, menyiapkan SDM yang berkualitas.

**P**ara profesional di industri perbankan Indonesia bersiap menyambut terintegrasinya sektor jasa keuangan dan perbankan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada 2020. Salah satunya, dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM), yakni bankir-bankir Indonesia, terkait dengan kompetensi dan kualifikasinya.

Bankir yang berkualitas akan mengokohkan industri perbankan nasional. Karena itu, industri perbankan nasional dituntut untuk melakukan perubahan, penyesuaian, dan peningkatan dalam rangka mempersiapkan integrasi tersebut.

Mengingat pentingnya upaya membangun kualitas SDM, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bersama *Infobank* menggelar “Indonesia Banking Human Capital Conference”, medio Oktober lalu. Melalui kegiatan tersebut, industri perbankan nasional kembali diingatkan untuk mempersiapkan SDM-nya sebaik mungkin sesuai dengan standar yang telah disepakati negara-negara ASEAN.

Perbanas mengusulkan adanya standardisasi kualifikasi pejabat bank di Indonesia yang disusun oleh berbagai pihak. Standardisasi yang diterapkan harus berdasarkan harmonisasi dengan Indonesian Qualification Framework (IQF) atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Selain itu, sesuai dengan beberapa program sertifikasi kompetensi profesi bankir Indonesia serta praktik di beberapa bank di dalam negeri dan sudah dijalankan di beberapa negara ASEAN.

“Kita sudah menghitung mundur untuk menyambut MEA



SDM perbankan; hitung mundur sambut MEA

**Mayoritas bank masih belum menyediakan dana pengembangan SDM sesuai dengan regulasi. Pada 2014 terdapat 86 bank dari 119 bank (72%) yang memberikan biaya pendidikan SDM kurang dari 5%.**

di industri perbankan. Beberapa upaya sudah kami lakukan untuk menyiapkan SDM, untuk menghadapi MEA. Kami juga melakukan *review* dan analisis terhadap *potential resources* yang dimiliki untuk memajukan industri. Kami berharap,

## JUMLAH SDM PERBANKAN INDONESIA

	2013	2014	2015	2016*	2020*
Pegawai Tetap	326.195	346.614	363.958	376.805	461.031
Pegawai Tidak Tetap	237.473	238.914	265.028	279.735	378.215
<b>Total</b>	<b>563.668</b>	<b>585.528</b>	<b>628.986</b>	<b>656.540</b>	<b>839.246</b>

Ket: \* = proyeksi

Sumber: OJK, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birl).



Maryono; lebih berkualitas

*human capital* yang dimiliki Indonesia bisa lebih berkualitas,” ujar Maryono, Wakil Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

Pembentukan standar kualifikasi akan melibatkan otoritas, pelaku industri, asosiasi industri dan asosiasi profesi, Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan langkah bersama itu, industri perbankan dan keuangan Indonesia diharapkan siap untuk duduk bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya demi menyepakati Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang dijadwalkan pada 2017-2018.

Sebelumnya, para pemimpin ASEAN dalam cetak biru (*blue print*) MEA 2007 telah menyatakan keinginannya untuk membangun ASEAN secara kolektif mulai 2015. Hal itu bertujuan memfasilitasi peningkatan perdagangan dan arus investasi di dalam regional Asia Tenggara. Terintegrasinya negara-negara ASEAN juga merupakan upaya meningkatkan daya saing ASEAN di pasar global. Melalui MEA, sektor perdagangan dan jasa, termasuk keuangan dan perbankan, disepakati untuk lebih saling terbuka.

Salah satu upaya peningkatan kualitas bankir yang saat ini telah berjalan adalah program sertifikasi. Namun, program sertifikasi yang ada saat ini harus diselaraskan dengan MRA, yang merupakan bagian dari kerja sama pengaturan negara-negara anggota ASEAN untuk mendesain dan memfasilitasi mobilisasi personal berkualitas dan bersertifikat.

MRA mutlak dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa, termasuk sektor jasa keuangan dan perbankan, yang berasaskan keadilan (*fairness*). Dalam hal ini, ada sejumlah hakikat MRA. Satu, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. Dua, negara asal diberikan otoritas untuk

mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat. Tiga, pengakuan tidak bersifat otomatis. Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan, baik di negara penerima maupun negara asal.

Jumlah bankir Indonesia yang bersertifikat saat ini masih tergolong rendah. Hal itu sangat perlu

diperhatikan seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), saat ini jumlah bankir atau tenaga kerja di sektor perbankan mencapai 531.000 orang, yang tersebar di 118 bank umum dan 1.664 bank perkreditan rakyat (BPR). Namun, Kemenaker mencatat, baru 12,5% bankir yang memiliki sertifikat bekerja.

Kemenaker menilai, perbankan memiliki kedudukan strategis sebagai motor penggerak roda perekonomian. Perbankan juga menjadi salah satu indikator stabilitas perekonomian suatu negara. Karena itu, kompetensi profesi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki bankir Indonesia.

Saat ini sertifikat yang dimiliki bankir-bankir Indonesia mayoritas di bidang *risk management*. Sementara, industri perbankan juga banyak membutuhkan sertifikasi untuk bidang pekerjaan lainnya, seperti bidang operasional, *funding and services*, dan *general banking*.

Bisnis perbankan melibatkan banyak unsur, mulai dari proses bisnis, budaya kerja, hingga teknologi. Karena itu, peningkatan kualitas bankir pun perlu dilakukan secara menyeluruh, mengaitkannya dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam bisnis bank.

Peningkatan kualitas bankir juga menjadi tugas utama setiap bank yang mempekerjakannya. Namun, nyatanya, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagian besar bank belum menyediakan anggaran pengembangan SDM sesuai dengan regulasi. Bahkan, biaya pelatihan dan pendidikan SDM perbankan trennya menurun pada periode 2010 hingga 2014. Jika pada 2010 bank yang memberikan biaya pendidikan SDM kurang dari 5% ada 67 bank dari 120 bank, pada 2014 jumlahnya meningkat menjadi 86 bank dari 119 bank.

Peningkatan kualitas SDM perbankan sejatinya tidak hanya bertujuan untuk menghadapi era MEA. Industri perbankan nasional yang terus berkembang, yang diikuti dengan makin tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan, juga kian membutuhkan sentuhan bankir-bankir kompeten.

Upaya mengamankan pasar dalam negeri jelas tak kalah penting. Di tingkat regional, Indonesia memang pasar terbesar. Ketika sektor jasa keuangan dan perbankan terintegrasi pada 2020, mungkin bukan bankir-bankir Indonesia yang akan banyak ke luar, melainkan bankir-bankir negara tetangga yang akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Karena itu, peningkatan kualitas bankir nasional penting dilakukan demi menjaga kedaulatan perbankan Indonesia, di mana bankir-bankirnya menjadi “raja” di negerinya sendiri. ■

# Kompetensi, Sertifikasi, dan Standardisasi

Kebutuhan akan SDM menjadi isu penting di industri perbankan. Persaingan ketat mulai terasa seiring dengan kian dekatnya pemberlakuan MEA di sektor keuangan.

**M**asyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di sektor keuangan baru akan diberlakukan pada 2020. Namun, bukan berarti kita, khususnya pelaku bisnis di sektor keuangan, berleha-leha. Menuju 2020 bukanlah waktu yang panjang. Karena itu, sejak sekarang segala hal yang dirasa masih kurang dalam menghadapi MEA harus disiapkan, misalnya soal SDM di industri perbankan.

Agar bisa bersaing di kancan regional ASEAN maupun global, SDM perbankan kita harus memenuhi standar kualitas. Dalam hal ini standar kualitas yang sudah ditetapkan di antara sesama negara anggota ASEAN.

MEA di satu sisi bisa merupakan peluang dan di lain sisi bisa juga merupakan tantangan. Seperti dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Hanif Dhakiri, Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi bagi negara-negara tetangga lainnya. Adanya MEA akan membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi mereka yang memiliki peluang besar untuk masuk ke sini.

Tingginya investasi yang masuk ke dalam negeri akan berdampak ke seluruh aspek industri, termasuk di dalamnya para tenaga kerja. Hal ini akan membuat mobilitas tenaga kerja makin ketat ke depannya. Dalam kaitannya dengan hal itu, kompetensi yang tinggi jelas diperlukan untuk bisa bersaing dengan para pemain asing tersebut.

“Kami sudah melakukan langkah strategis, di antaranya percepatan sertifikasi kompetensi, percepatan peningkatan kompetensi, dan pembatasan tenaga kerja asing. Sudah ada 572 standar kompetensi yang disiapkan untuk meningkatkan



Muliaman D. Hadad; *roadmap* yang jelas

kualitas SDM yang berkompetensi,” jelasnya.

Masih menurut Hanif, untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan standar regional, pihaknya juga sudah membuat skala prioritas untuk setiap sektor. Setidaknya sudah ada 12 sektor yang menjadi prioritas kementerian, yang meliputi 5 sektor jasa dan 7 sektor perdagangan dan industri.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi SDM yang sangat besar. Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 122,8 juta SDM, sebanyak 93% adalah pekerja dan sisanya pengangguran. Sebanyak 71 juta lulusan SD dan SMP dan 12 juta lulusan perguruan tinggi.

“Saat ini telah disusun 573 standar kompetensi kerja di Indonesia. Percepatan terhadap akses sertifikasi kompetensi ini perlu dilakukan karena akan berdampak. Percepatan ini

dilakukan bagi yang sudah bekerja dan yang belum. Kita sudah ada 610 lembaga kompetensi saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan, harus ada *roadmap* yang jelas di industri jasa keuangan, terutama di sektor perbankan. Kondisi industri perbankan dalam negeri saat ini menuntut SDM yang lebih kreatif lagi daripada sebelumnya.

“Kita tidak bisa tinggal diam, harus aktif mencari peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada. Mudah-mudahan, kesepakatan ASEAN ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang khawatir bukan hanya kita, justru mereka takut kalau ada SDM kita yang masuk ke negeri mereka,” katanya. ■

# Kesiapan SDM Menghadapi Dinamika Pasar

Sertifikasi dan kompetensi menjadi hal yang mendesak bagi SDM di industri perbankan agar bisa terus bersaing. Kebutuhan akan hal itu menjadi standar wajib untuk dipenuhi semua pelaku industri.

Menjadikan industri perbankan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri memang bukan perkara mudah. Namun, bukan berarti hal itu tidak bisa diwujudkan. Dinamika pasar memang terus berkembang. Beberapa tahun lagi pasar terbuka ASEAN untuk sektor keuangan akan diberlakukan. Agar bisa tetap eksis dan bersaing, tentu pelaku industri perbankan dalam negeri harus bisa menyesuaikan diri. Artinya, segala sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia (SDM), harus terus ditingkatkan kualitasnya.

Banyak cara yang bisa dilakukan pelaku di industri ini untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan mumpuni di bidangnya. Contohnya dengan sertifikasi dan standardisasi, suatu cara yang juga dilakukan pemerintah. Cara ini diharapkan bisa menghambat ekspansi SDM asing masuk ke Tanah Air. Dengan adanya keterbukaan pasar, SDM industri perbankan suatu negara tentu akan dengan mudah masuk ke negara lain. Begitu juga sebaliknya.

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), mengatakan, sertifikasi dan kualifikasi memang masih menjadi isu penting di dalam negeri. Mengembangkan pasar dalam negeri merupakan prioritas yang harus digarap oleh semua pelaku industri.

“Pasarnya itu ada di dalam Indonesia. Kalau kita tidak siap, orang dari luar sana yang akan menguasai pasar kita. Seharusnya kita yang menguasai. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, memasuki pasar luar negeri selain membutuhkan modal yang besar, memerlukan pembelajaran yang tidak sebentar. Luasnya wilayah Indonesia merupakan salah satu modal bagi kita untuk bisa meningkatkan penetrasi perbankan di Tanah Air.

Namun, ada hal-hal yang harus diwaspadai oleh para pelaku industri di dalam negeri. Salah satunya ialah industri perbankan akan kekurangan SDM lokal. Jika industri perbankan tidak makin membesar, SDM yang memiliki kualifikasi, sertifikat, dan kompetensi yang baik akan pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.

“Welsh Fargo, bank yang besar di Amerika, saja tidak tertarik untuk masuk ke pasar regional atau pasar negara lain. Saat ini bank regional tidak ada yang dominan di negara lain.



Karena perbankan itu *follow the trade*. China, misalnya, hanya fokus kerja sama dengan Indonesia. Daripada kita tempur dengan negara lain di negeri mereka, lebih baik kita garap pasar kita sendiri,” tegas Jahja.

Sementara itu, Sanjay N. Bharwani, *Chief Human Capital Officer* Bank Mandiri, mengatakan, SDM memang masih sangat diperlukan oleh industri perbankan dalam negeri. Bukan hanya SDM untuk perbankan yang menjalankan layanan konvensional, melainkan juga perbankan yang mempunyai layanan digital. Pasalnya, ekspansi digital di Tanah Air makin besar. Harus diakui, banyaknya perusahaan *start up* baru yang bergerak di sektor *financial technology* (*fintech*) turut mengurangi minat masyarakat terhadap layanan perbankan.

“Kalau *fintech* ini makin besar, nasabah perbankan akan bergeser ke sana. Pengurangan nasabah juga akan berdampak kepada SDM perbankan. Untuk bank besar yang sudah memiliki layanan digital mungkin akan ada pengaruhnya sedikit. Tapi, untuk mereka yang tidak punya layanan digital, apakah perbankannya akan bertahan? Apakah SDM perbankan masih akan bertahan?” katanya.

Menghadapi hal tersebut, pelaku industri perbankan tidak hanya harus menyiapkan SDM yang mampu bersaing di segala lini bisnis, tapi juga harus menyiapkan strategi yang tepat agar bisnis terus berkembang. *Skill set* yang dimiliki SDM perbankan nasional masih cenderung tradisional sehingga perlu dikembangkan lagi. ■

# Pasar Repo Makin Dalam

Transaksi repo terus digencarkan. Dengan banyaknya pelaku pasar yang ikut berpartisipasi diharapkan pasar keuangan di dalam negeri bisa makin dalam.

Penerapan suku bunga acuan baru oleh Bank Indonesia (BI) dari BI Rate menjadi BI 7-Day *Reverse Repo* membuat pasar keuangan makin marak. Penerapan suku bunga acuan baru ini diperkirakan akan makin meningkatkan transaksi instrumen keuangan, baik dari yang paling pendek maupun yang paling panjang.

Hal itu sesuai dengan keinginan BI yang sedang menggenjot pendalaman pasar keuangan di dalam negeri. Saat ini industri keuangan belum mampu menarik minat para pelaku industri dan masih rawan terhadap guncangan, terutama dari luar negeri, khususnya pada nilai tukar rupiah.

Salah satu langkah yang sedang gencar dilakukan BI untuk memperdalam pasar keuangan ialah dengan mengajak perbankan untuk lebih aktif lagi melakukan transaksi *repurchase agreement (repo)* atau transaksi gadai bersyarat antarbank. *Repo* adalah transaksi penjualan instrumen efek antardua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian. Misalnya, pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek tersebut dengan harga tertentu yang disepakati.

Transaksi antarbank ini kurang diminati karena banyaknya prasyarat yang harus dipenuhi oleh bank pemohon yang ingin menjual surat utangnya. Untuk memudahkannya, perbankan dan pihak terkait diharapkan turut serta dalam *Global Master*



*Repurchase Agreement (GMRA)* yang nantinya akan menggairahkan pasar *repo* di Tanah Air.

Lazimnya, instrumen yang digunakan dalam transaksi *repo* ialah obligasi korporasi, obligasi negara (Surat Utang Negara atau SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan saham. Transaksi ini merupakan salah satu alternatif dalam investasi keuangan.

Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan, pengubahan suku bunga acuan itu memang sudah cocok karena sesuai dengan instrumen yang banyak ditransaksikan di pasar. Menurutnya, penerapan suku bunga acuan yang baru akan lebih efektif untuk memperdalam pasar keuangan, terutama pasar *repo*.

Selain untuk memperdalam pasar keuangan, fasilitas *repo* bermanfaat sebagai jalur transmisi utama kebijakan moneter BI. Jadi, pengembangan pasar *repo* akan menentukan kebijakan bank sentral dari segi transmisi.

Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI, mengatakan, transaksi *repo* ini akan menjawab kebutuhan likuiditas bank dalam jangka pendek. Pasalnya, penggunaan *repo* ini akan memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki bank lain. Hal ini juga yang sedang didorong BI agar bank-bank melakukan transaksi satu sama lain dalam bentuk *repo*.

“Dengan transaksi antarbank yang meningkat volume dan jenisnya, pasar keuangan pun akan lebih dalam,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, transaksi *repo* antarbank sudah mengalami peningkatan. Volume (rata-rata harian) transaksi *repo* antarbank bergerak dari nol pada Januari 2016 hingga mencapai volume tertinggi sebesar Rp1,8 triliun pada minggu terakhir Juni 2016.

Pendalaman pasar keuangan perlu dilakukan melalui pasar *repo* karena transaksi ini relatif aman dan memiliki jaminan. Berbeda dengan pasar uang antarbank (PUAB) yang masih *unsecured*. Selain itu, bunga yang ditawarkan relatif lebih rendah daripada PUAB.

Masih menurut Mirza, pengembangan pasar *repo* di Tanah Air penting dilakukan karena transaksi keuangan yang masih belum tepat antara yang punya kelebihan likuiditas dan yang membutuhkan likuiditas jangka pendek. Hal ini menyebabkan banyak pelaku industri yang menempatkan dananya di bank sentral.

“BI sebenarnya tidak perlu likuiditas tersebut. Yang perlu likuiditas ialah bank-bank lainnya. Alangkah baiknya kalau likuiditas itu diberikan dan beredar antarbank-bank yang ada di sini. Likuiditas tersebut juga bisa dibeli instrumen lainnya, seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau ditempatkan di pasar uang. Dua tahun lalu penempatan kembali mencapai Rp150 triliun-Rp200 triliun. Saat ini mencapai Rp300 triliun-Rp350 triliun,” tambahnya.

Saat ini, menurut Mirza lagi, transaksi *repo* antarbank baru mencapai Rp1,5 triliun. Berbeda jauh dengan PUAB yang sudah lebih dari Rp14 triliun. Meski begitu, jumlah dana yang ada di PUAB lebih banyak menumpuk di tenor semalam atau maksimal dua minggu.

Menurutnya, sangat susah mencari dana yang mengendap di pasar *repo* atau PUAB yang berada di kisaran tenor satu sampai dengan tiga bulan. Hal ini pula yang membuat pencarian likuiditas lebih banyak ke bank sentral, bukan ke pasar *repo* atau PUAB.

Terkait dengan usaha untuk meningkatkan transaksi *repo* antarbank, bank-bank kelompok BUKU 4, yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI, melakukan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)* dengan beberapa kantor cabang bank asing (KCBA), yaitu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mizuho Indonesia, DBS, Standard Chartered, ANZ, dan JP Morgan Chase.

Nanang Hendarsah, Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan BI, mengatakan, adanya bank asing di dalam transaksi *repo* ini akan mampu berkontribusi lebih banyak lagi untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Dia mengakui, beberapa bank asing sudah menyatakan minat untuk teken *GMRA*, tapi belum terealisasi. Salah satunya The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) yang sudah menyatakan minatnya untuk menyepakati *GMRA*.

“Bergabungnya enam kantor cabang bank asing ini diharapkan diikuti oleh bank asing lainnya untuk kontribusi terhadap pendalaman pasar keuangan. Ada beberapa yang akan teken selanjutnya. HSBC dalam waktu dekat tahun ini akan teken *GMRA*,” ujar Nanang.

Dia melanjutkan, untuk masuk ke dalam *GMRA*, bank asing membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Bank asing di Indonesia harus mengikuti standar dan ketentuan yang diberlakukan perusahaan induk dari negara asal. Kendati demikian, bergabungnya bank asing menjadi momentum untuk menguatkan *GMRA* dan pasar keuangan di Tanah Air.

Namun, dari 65 bank yang sudah menyepakati transaksi antarbank, baru 27 bank yang sudah melakukan transaksi *repo*.

Lewat perjanjian ini diharapkan kepercayaan antarbank di Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan dapat meningkat sehingga likuiditas antarbank dapat lebih cair dibandingkan dengan menaruh kelebihan likuiditasnya di BI.

Per akhir April nilai transaksi *repo* sebesar Rp250 miliar per hari. Nilai itu lalu naik dua kali lipat menjadi Rp425 miliar per hari. Targetnya, transaksi *repo* ini bisa mencapai rata-rata Rp800 miliar per hari. Pada pekan terakhir Mei nilai transaksi *repo* bahkan melonjak menjadi Rp1,03 triliun per hari.

Bergabungnya bank-bank asing tersebut, masih menurut Nanang, akan diikuti dengan peningkatan transaksi *repo*. Dia berharap, transaksi *repo* hingga akhir 2016 mencapai Rp5 triliun. Saat ini cabang bank asing yang belum mengikuti *GMRA* ialah Bank China Limited, Bank of America NA, The Royal Bank Of Scotland NV, Bank Bangkok Dlc, dan HSBC. ■



**Mirza Adityaswara;** kebutuhan likuiditas jangka pendek



# BI 7-Day Repo Turun Beruntun

Pertumbuhan ekonomi yang membaik memberikan dampak positif terhadap suku bunga acuan. Setidaknya bank sentral sudah dua kali menurunkan BI 7-Day Repo Rate sejak diberlakukan.

Sejak diberlakukan pada Agustus tahun ini, suku bunga acuan yang baru, BI 7-Day Repo Rate, sudah mengalami dua kali penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang terus membaik sampai dengan saat ini.

Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa pelonggaran kebijakan moneter tersebut akan memperkuat kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui percepatan implementasi reformasi struktural. BI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah menyiapkan langkah kebijakan agar implementasi undang-undang (UU) pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat berdampak optimal bagi perekonomian nasional.

Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, mengatakan, penurunan suku bunga acuan tahap pertama yang dilakukan bank sentral lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang masih lambat, terutama Amerika Serikat (AS). Lemahnya pemulihan ekonomi AS mengakibatkan dipertahankannya suku bunga kebijakan AS atau Fed Fund Rate (FFR) dan diperkirakan akan mengalami satu kali kenaikan sepanjang 2016.

BI memandang berbagai langkah masih diperlukan untuk meningkatkan permintaan domestik guna terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2016 diperkirakan masih akan berada di kisaran 4,9%-5,3% (*year on year* atau *yoy*).

Meski tekanan terhadap sektor komoditas terus berlanjut, neraca perdagangan sampai dengan Agustus 2016 justru mengalami surplus sebesar US\$0,29 miliar. Memang masih rendah. Namun, hal ini memberikan indikasi membaiknya aktivitas ekonomi domestik.

Hampir mirip dengan yang terjadi pada tahap pertama, penurunan suku bunga acuan tahap kedua juga ditopang oleh beberapa hal yang sama. Alasan utama bank sentral menurunkan lagi suku bunga acuan ialah masih stabilnya kondisi ekonomi di dalam negeri, yang mendekati batas bawah kisaran sasaran.

Alasan lainnya ialah defisit transaksi berjalan yang lebih baik daripada perkiraan, surplus neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. BI juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan



stimulus pertumbuhan, dan pelaksanaan reformasi struktural berjalan dengan baik sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“BI meyakini, pelonggaran (kebijakan) moneter ini akan memperkuat kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui percepatan implementasi reformasi struktural,” jelas Tirta.

## Berdampak Luas

Keputusan bank sentral untuk menurunkan BI 7-Day Repo Rate dipercaya akan berdampak luas terhadap industri perbankan. Penurunan suku bunga acuan memunculkan optimisme pelaku industri. Dengan adanya kebijakan tersebut, likuiditas akan membaik. Suku bunga deposito juga trennya akan menurun, yang saat ini masih relatif mahal.

Sis Apik Wijayanto, Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengatakan, penurunan suku bunga acuan akan berdampak pada pemberian suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Menurutnya, bunga KPR merupakan daya pikat yang menarik bagi para debitur dan pengembang.

Bagi para debitur, penurunan ini akan memengaruhi besaran bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya. Sedangkan bagi pengembang, penurunan suku bunga KPR mampu menjadi motor penggerak penjualan.

“Kami sudah menawarkan suku bunga sangat menarik sejak awal tahun, yaitu rata-rata 9%. Kemudian, melalui program KPR Lebaran, rata-rata bunga KPR yang diberikan 8,9% hingga 7,99% jelang akhir tahun ini,” katanya. ■



# LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA

Profesional, Terpercaya dan Pilihan  
Utama Nasabah dan Bank Dalam  
Menyelesaikan Sengketa



Griya Perbanas Lt.2,  
Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940  
Telp. 021-5276552.  
Website : [www.lapspi.org](http://www.lapspi.org).  
Email : [sekr@lapspi.org](mailto:sekr@lapspi.org)